

**KRITERIA PENERAPAN ALASAN SUBYEKTIF OLEH JAKSA
PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENAHANAN DI TAHAP
PENUNTUTAN**

I Gde Ngurah Surya Adiputra Sriada, Dr. Sri Lestariningsih, S.H. M.Hum, Milda
Istiqomah, SH. MTCP

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Adiputrasurya94@yahoo.com

ABSTRAK

Pada penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Kriteria Penerapan Alasan Subyektif Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penahanan Di Tahap Penuntutan. Dalam hal ini dilatarbelakangi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menggunakan alasan subyektif untuk menentukan terdakwa / tersangka apakah patut ditahan atau tidak ditahan, dikarenakan pandangan dari jaksa yang sangat berbeda-beda pemikiran dalam hal penahanan terdakwa / tersangka ada yang ditahan dan ada juga yang tidak ditahan tergantung kondisi dan situasi Jaksa Penuntut Umum secara eksternal dan internal.

Dalam upaya mengetahui kriteria penerapan alasan subyektif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Malang, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan tetap mengedepankan pembahasan yuridis yang berpedoman pada peraturan yang dijadikan dasar untuk menganalisa gejala-gejala yang timbul di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi kendala tersebut, Kejaksaan Negeri Malang melakukan upaya baik yang berupa upaya preventif maupun upaya represif. Seperti perlunya melakukan

koordinasi dengan Terdakwa, Pengadilan Negeri Malang dan Polres Kota Malang terkait dengan dilakukannya penahanan di tahap penuntutan sampai dengan terdakwa itu dikatakan tidak bersalah.

ABSTRACT

In writing this paper the author discusses the application of reason Subjective Criteria By Doing Prosecution In Detention In Phase Prosecution. In this case the public prosecutor was motivated by the use of subjective reasons for determining the defendant / suspect is arrested or detained should, because the view of the prosecutor very different thinking in terms of detention of the accused / suspects were arrested and detained some are not dependent condition and situation of the Public Prosecutor in external and internal.

In an effort to find out the criteria for the application of subjective reasons by the public prosecutor in detention at the stage of prosecution in Malang District Attorney, the approach used in this study is a juridical sociological approach to research that is conducted without prejudice to the juridical discussion guided by regulations made basis for analyzing the symptoms that arise in the community.

Based on these results, the authors obtain an answer to the problems that exist in this study, that the public prosecutor in overcoming these obstacles, Malang State Attorney efforts either in the form of preventive measures and repressive efforts. Such as the need to coordinate with the defendant, the District Court and Police Malang associated with doing detention on the stage of the prosecution to the defendant was said to be not guilty.

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu bagian dalam suatu sistem peradilan pidana, kewenangan untuk melakukan penahanan selain dimiliki oleh Penyidik, menurut ketentuan dalam KUHAP BAB V Bagian kedua Pasal 20-31, dimiliki juga oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Disini peran kejaksaan menduduki posisi kunci dalam proses penyelesaian suatu perkara. Karena Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan

serta kewenangan yang lain berdasarkan undang-undang serta mengemban misi sebagai penegak hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004. Sudah menjadi kewajiban dari seseorang Jaksa Penuntut Umum mempunyai fungsi yang berada di tengah-tengah penyidik dan hakim.¹ Pengertian Jaksa sendiri menurut Undang-undang No. 16 tahun 2004 adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Di tahap penuntutan ini Jaksa penuntut umum mempelajari BAP dan membuat surat dakwaan, dalam hal inilah ditahap penuntutan ini terdapatlah tahap dimana Jaksa penuntut umum berwenang melakukan penahanan kepada tersangka / terdakwa. Jaksa Penuntut Umum selain berwenang melakukan penuntutan juga memiliki kewenangan penahanan sesuai dengan Pasal 20 AYAT 2 KUHAP yang berbunyi : untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Penahanan ini dilakukan dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 ayat 2 KUHAP. Penahanan ini dilakukan karena penuntut umum beranggapan bahwa tersangka/ terdakwa akan melarikan diri dari proses persidangan, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.²

Berdasarkan prasarvey di Kejaksaan Negeri Malang untuk perkara atas nama terdakwa Susanto yang ditahan selanjutnya Rangga Dida Pratama dan Sulistyowati yang belum ditahan. Meskipun berkas sudah P-21 (lengkap) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang, mereka tetap menghirup udara bebas. Karena itu, perlu dilakukan penahanan bagi tersangka tersebut untuk kesetaraan dengan

¹ Basrief Arief, **Pengertian Kejaksaan**, www.kejaksaan.go.id/pengertian-jaksa-penuntut-umum, diakses tanggal 20 Agustus 2013

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal 65

tersangka lain.³ Hal ini disampaikan pengamat hukum pidana, Panji Amiarsa. Panji mengatakan, jika sudah memasuki tahap P-21 atau berkas dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, tersangka dari penyidikan yang dilakukan penyidik polisi, menjadi kewenangan kejaksaan untuk menahan para tersangka.⁴

Tahap penuntutan menjadi wewenang JPU, jika sudah masuk persidangan wewenang Majelis Hakim. Saat ini ada ditangan Kejaksaan, menahan atau tidak ditahan. Akan tetapi pada praktek yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik. Seperti penerapan penahanan terhadap masing-masing terdakwa tindak pidana yang ditahan oleh Bapak Ari Kuswadi selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Malang diterapkan dengan cara yang berbeda-beda. Berdasarkan buku Register Tahanan Tahap Penuntutan⁵:

Tabel 1.1 Daftar Status Penahanan Tersangka / Terdakwa 2012-2013

NO	KETERANGAN	2012	2013
1	Ditahan	643	195
2	Tidak ditahan	32	11
	Jumlah	675	206

Sumber : Data Kejaksaan Negeri Malang Buku Register Tahanan Tahap Penuntutan, sekunder diolah, 2013.

Pembedaan perlakuan JPU melalui alasan subyektif terhadap penahanan terdakwa tindak pidana seperti ini dapat menimbulkan berbagai *opini public* yang mungkin dapat berdampak kekacauan terhadap jalannya proses penuntutan yang tentunya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh proses peradilan yang sedang dihadapi oleh Penuntut Umum dikarenakan tidak berkaitan dengan asas *Equality Before The Law* dan *asas presumption of Innocent*.

Pada 3 (tiga) alasan inilah yang dipermasalahkan bagaimana Jaksa Penuntut Umum menentukan Kriteria penerapan alasan subyektif tersebut dalam hal kekhawatiran melarikan diri yang seperti apa, atau merusak / menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, karena

³ Hasil Prasurvey di Kejaksaan Negeri Malang dengan Bapak Irawan Staff Pidana Umum, 4 September 2013

⁴ Panji Amiarsa, 2013, **Baik Tersangka PNS Ditahan**, www.radarcirebon.com/baiknya-tersangka-dari-pns-ditahan, diakses tanggal 4 September 2013

⁵ Hasil Prasurvey di Kejaksaan Negeri Malang yang terdapat pada buku Register Tahanan Tahap Penuntutan, 18 September 2013.

berdasarkan pada subyektifitas / pandangan dari jaksa yang sangat berbeda-beda pemikiran dalam hal penahanan terdakwa / tersangka ada yang ditahan dan ada juga yang tidak ditahan tergantung kondisi dan situasi Jaksa Penuntut Umum serta bisa jadi dilihat dalam hal kondisi tersangka / terdakwa. Berdasarkan uraian diatas, merupakan obyek yang pmenarik bagi penulis sehingga dalam hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam suatu penulisan karya ilmiah judul ini.

B. Permasalahan

1. Apa yang menjadi kriteria penerapan alasan subyektif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan?
2. Apa kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan kriteria penerapan alasan subyektif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan?

C. Pembahasan

a) Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat. serta menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.

2. Jenis Pendekatan

Metode pendekatan menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan yuridis digunakan bahwa untuk penelitian mengkaji permasalahan dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*Law Enforcement*) karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan – permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.⁶

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI PRESS, 1986, Hlm 10

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kota Malang yang terletak di Jalan Simpang Panji Suroso No. 5 Kota Malang.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

a. Data Primer

Penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian di lapangan berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis.⁷ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang telah ditetapkan sebagai sampel melalui wawancara yakni pihak-pihak terkait dengan dilakukannya penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana..

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer. Data yang diperoleh melalui studi dokumen, termasuk data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari data yang ada dalam keadaan siap dan erat kaitannya dengan penelitian ini⁸.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan (*library reserach*)

Yaitu studi yang penulis lakukan dengan jalan membaca buku-buku, majalah serta sumber data yang lainnya yang ada di perpustakaan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Yaitu studi yang penulis lakukan dengan 2 (dua) cara: wawancara (*interview*) dan pengamatan (observasi). Hal ini sangat

⁷ Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hal 91

⁸ Abdulkalir Muhammad, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, Bandung, 2004, Hal 102

penting untuk melihat sampai sejauh manakah teori-teori tentang hukum atau juga tentang tugas-tugas Kejaksaan diterapkan dalam praktek sehingga bisa diidentifikasi dengan penulis baik dari *library research* dan *field research* dipergunakan sedemikian rupa sebagai bahan analisa menuju kearah suatu kesimpulan.

c. Akses Internet

Teknik ini diperoleh dengan cara mengakses internet melalui komputer, lalu memperoleh data melalui website-website resmi hukum yang terkait dengan penelitian..

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi (*universe*) yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisa yang cirinya akan diduga.⁹ Terkait dengan kriteria penerapan alasan subyektif oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penahanan terhadap terdakwa. Populasi yang akan diambil dari penelitian ini adalah seluruh jaksa penuntut umum di Kejaksaan negeri Kota Malang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi.¹⁰ Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* , yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu..¹¹ Responden dalam hal penelitian ini yang dipilih yaitu dari sampel yang telah ditentukan dan nantinya akan diambil kevalidan data. Responden yang diambil yaitu 3 orang jaksa anggota di Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang yaitu Ari Kuswadi, Suhartono, Irawan dan 1 orang jaksa anggota di Bagian Seksi Intelijen yaitu Trisnaulan.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*Jilid 1, Yogyakarta :Andi Offset,1989, Hlm 70

¹⁰ Ibid Hlm 42

¹¹ Ibid Hlm 70

7. Teknik Analisis Data

Digunakan teknik pengolahan data secara *deskriptif kualitatif*,¹² yaitu peneliti memaparkan data dengan berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data dalam secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Selanjutnya Teknik *deskriptif analitis*, yaitu peneliti mencoba untuk memaparkan secara menyeluruh data primer dengan cara memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.¹³

8. Definisi Operasional

- a. Yang dimaksud dengan Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu subyek.
- b. Alasan Subyektif adalah ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar obyektif , didasarkan pula keadaan yang menimbulkan kekhawatiran menurut (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) yaitu diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

¹² Ronny Haningto Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, Hlm 24

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hal 91

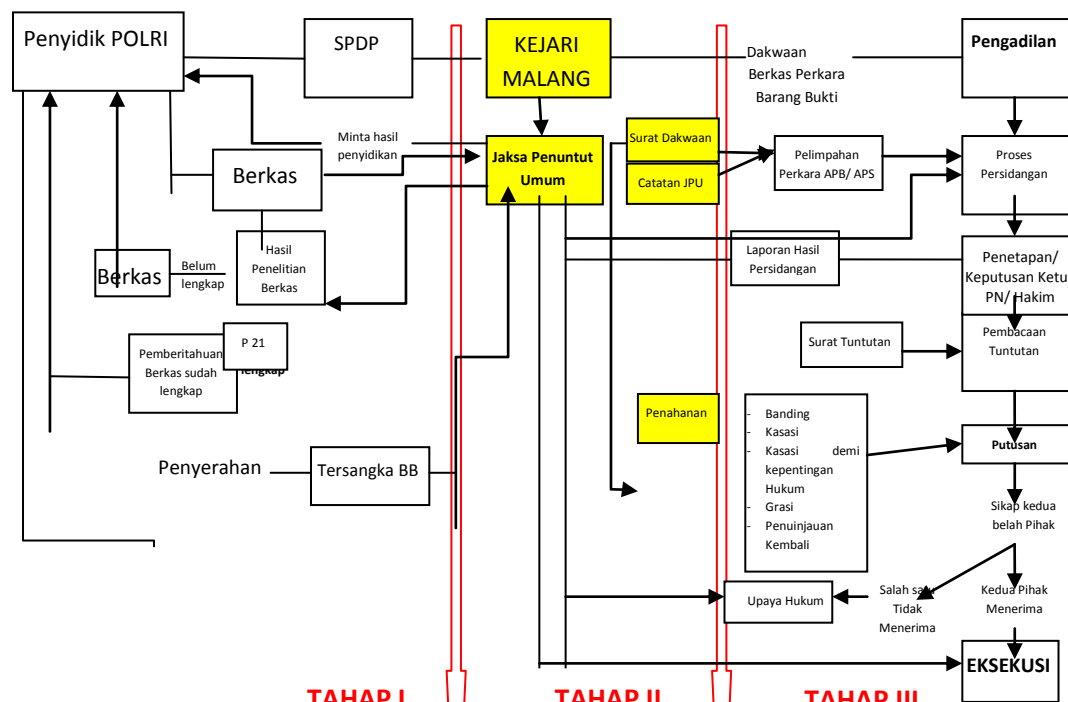
- c. Kejaksaan R.I adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Malang
- d. Jaksa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di Kejaksaan Negeri Kota Malang
- e. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya.
- f. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

D. Hasil Penelitian

A. Kriteria Penerapan Alasan Subyektif Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penahanan Di Tahap Penuntutan.

A.1 Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Bagan 4.2 Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.



Sumber : data Sekunder dari Kejaksaan Negeri Malang, dianalisis, 2015

Pada tahap prapenuntutan ini penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa hukum yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Selanjutnya penyidik menyiapkan Berkas Perkara dan melimpahkannya kepada Penuntut umum, setelah menerima pelimpahan berkas perkara, Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada penyidik lengkap tidaknya berkas perkara.

Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikannya belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara (P-18,P-19) kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung berkas perkara diterima penuntut umum. Apabila berkas perkara sudah lengkap maka dilanjutkanlah ketahap penuntutan dan Penuntut Umum menerbitkan (P-21).

Selanjutnya penuntut umum segera menerima tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (*Vide* Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP), dan melihat apakah perkara yang dimaksud sudah layak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Malang, kalau sudah layak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Malang dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mempersiapkan surat dakwaan. Pada proses selanjutnya Kajari memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menahan tersangka / terdakwa berdasarkan Nota Pendapat Penahanan yang telah diajukan sebelumnya oleh Jaksa Penuntut Umum secara hierarkis kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Kepala Kejaksaan Negeri Malang. Apabila dilaksanakan penahanan terhadap tersangka / terdakwa maka proses dimaksud disebut dengan proses penahanan.¹⁴

Untuk selanjutnya akan dijelaskan dalam bagan prosedur penahanan sebagai berikut : diawali dengan proses prapenuntutan yang biasa disebut dengan tahap I (*Vide* Pasal 8 ayat 3 huruf a KUHAP) maka proses yang dimaksud untuk menentukan apakah suatu perkara pidana yang tertuang

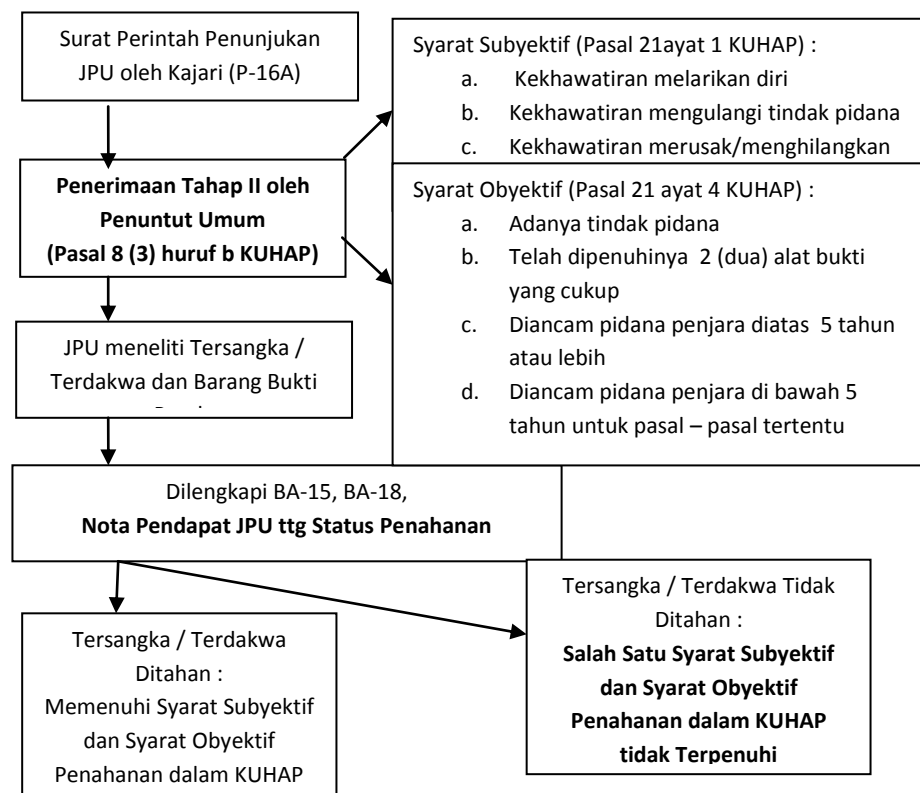
¹⁴ Hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Malang dengan Bapak Ari Kuswadi,staff pidana umum tanggal 18 Oktober 2013.

dalam berkas perkara telah memenuhi syarat formil ataupun syarat materiil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 110 KUHP.

Apabila proses pemeriksaan Berkas Perkara dimaksud telah selesai dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan diterbitkannya P-21 maka penanganan perkara memasuki tahap Penuntutan yang sering disebut Tahap II (*vide* Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHP). Pada tahap inilah diserahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Penuntut Umum yang salah satunya terkait tentang kewenangan Penahanan tersangka / terdakwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan 4.3 dibawah ini.

Bagan 4.3 Prosedur Penahanan di Tingkat Penuntutan

Sumber : Data sekunder, diolah, 2013



Dalam bagan diatas tergambar dengan sangat jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kewenangan penahanan di tahap penuntutan terhadap terdakwa / tersangka mempunyai kriteria tersendiri dalam penerapan alasan subyektif dan obyektif. Secara umum syarat – syarat penahanan dalam KUHP tetap menjadi acuan berdasarkan asas

lex specialis derogat legi generalis namun secara khusus sebagian besar kewenangan penahanan di tingkat penuntutan dikarenakan adanya alasan subyektif yang digunakan oleh masing-masing Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan kewenangan apakah tersangka / terdakwa perlu ditahan atau tidak ditahan.

Alasan subyektif untuk melakukan penahanan berdasarkan KUHAP merujuk pada Pasal 21 ayat 1 KUHAP dimana untuk menahan terdakwa / tersangka dapat dilakukan jika Penuntut Umum memiliki dugaan keras berdasarkan alat bukti yang cukup serta penyidik / penuntut umum memiliki kekhawatiran-kekhawatiran seperti Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana.

Untuk kepentingan penyidikan dan penuntut. Alasan subyektif internal di luar alasan yang termuat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP¹⁵ yaitu :

1. Alasan kolateral (kepercayaan) dari Jaksa Penuntut Umum terhadap tersangka pelaku tindak pidana. misalnya ada jaminan dari keluarga/ penasehat hukumnya
2. Saat itu tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana dibutuhkan keluarga, sehingga dimungkinkan untuk tidak dilakukan upaya penahanan. Tulang punggung keluarga namun harus dipertimbangkan untuk jenis jenis tindak pidana yang ada korbannya, misalnya korban sudah memaafkan pelaku, apakah korban sudah mendapat ganti kerugian dari pelaku. Apakah pelaku dapat menjamin dirinya dapat melanjutkan proses persidangan untuk delik non aduan / delik umum.
3. Kondisi fisik. Misalnya terdakwa sakit yang membutuhkan perawatan intensif, yang mana sakitnya itu tidak memungkinkan baginya untuk melarikan diri atau membutuhkan perawatan di rumah sakit¹⁶.

¹⁵ Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Malang dengan Ibu Trisnaulan, Jaksa Fungsional pada bidang Intelijen, tanggal 12 November 2013.

Selain ketiga alasan subyektif internal tersebut, ada alasan – alasan lainnya yaitu tersangka / terdakwa masih berstatus anak – anak dan pelajar, adanya jaminan uang yang dapat dititipkan ke Kepanitera Pengadilan setempat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 dan 36 PP No.27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

A.2. Alasan Subyektif Yang Mempengaruhi Penahanan Oleh Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum secara subyektif melakukan penahanan mempunyai tiga (3) alasan yang mempengaruhi terjadinya penahanan selain yang tersebut dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP. Disini timbul alasan-alasan yang terjadi yaitu :

a. Alasan Operasional

Alasan operasional berkaitan erat dengan keyakinan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri tersangka / terdakwa yang menjadi alasan subyektif penahanan seperti :

- Status diri tersangka / terdakwa, apakah masih berstatus anak – anak dan pelajar,
- Apakah telah ada perdamaian sebelumnya dengan korban,
- Apakah ada bentuk jaminan orang ataupun orang,
- Apakah ada halangan sakit dalam diri tersangka / terdakwa

b. Alasan Yuridis

Alasan yang berdasarkan pada Pasal 21 ayat 4 KUHAP bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka / terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana sebagaimana dimaksud Khusus untuk Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie*, pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* tahun 1931 nomor 471,

¹⁶ Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Malang dengan Ibu Trisnaulan, Jaksa Fungsional pada bidang Intelijen, tanggal 12 November 2013.

maka ada aturan hukum yang masih berlaku jauh sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Ketentuan tersebut secara otomatis diambil alih menjadi aturan hukum yang berlaku bagi negara Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pengambil alihan dimaksud untuk menghindari adanya kekosongan hukum terutama tentang Ordonansi Bea dan Cukai pada waktu itu.

c. Alasan Sosiologis

Alasan sosiologis lebih menitikberatkan pada jenis perkara yang menjadi perhatian masyarakat, semisal seorang nenek yang melakukan pencurian coklat dan terus ditahan di Kabupaten Sidoarjo,¹⁷ ada pula anak-anak masih sekolah dan dituduh mencuri sandal di Makasar makanya tidak bisa ditahan.¹⁸

B. KENDALA YANG DIHADAPI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENETAPKAN KRITERIA PENERAPAN ALASAN SUBYEKTIF UNTUK MELAKUKAN PENAHANAN DI TAHAP PENUNTUTAN

Sesuai hasil wawancara dengan bapak Ari Kuswadi sebagai salah satu Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Malang, pada dasarnya dalam melaksanakan suatu upaya penahanan terhadap tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana, seorang Jaksa Penuntut Umum mengalami kendala-kendala sebagai berikut:

1. Kendala Eksternal

- a. Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Malang dalam melakukan penahanan rumah tahanan dengan cara menitipkannya di Lapas Klas I Malang, hal ini dikarenakan Kejaksaan Negeri Malang belum memiliki rumah tahanan sendiri. Serta kondisi rumah tahanan sudah dalam status overcapacity atau dengan kata lain kelebihan daya tampung,

¹⁷Arbi Anugrah, 2011, **Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari**, www.detik.com/news/read/2009/11/19/152435/1244955/10/mencuri-3-buah-kakao-nenek-mina-dihukum-1-bulan-15-hari, diakses tanggal 7 Januari 2014

¹⁸Andi Saputra, 2011, **Curi Sandal Polisi, Pelajar Terancam 5 Tahun Bui, KPAI: Ini Lebay**, www.detik.com/news/read/2011/12/21/142137/1796656/10/curi-sandal-polisi-pelajar-terancam-5-tahun-bui-KPAI-ini-lebay, diakses tanggal 7 Januari 2014

- b. Ketua Pengadilan Negeri biasanya sering terlambat membuat surat perpanjangan penahanan ke Lapas Klas I Malang sehingga menolak dilakukannya penitipan penahanan terhadap tersangka tindak pidana di Rutan Klas I Malang.
- c. Pengetahuan tersangka / terdakwa terhadap hukum acara pidana yang ada sangatlah minim, seringkali menimbulkan konflik - konflik dalam penerapan hukum acara pidana yang ada, terhadap tersangka / terdakwa diatas, misalnya terdakwa melarikan diri. Untuk itu terdapat 2 kemungkinan yang dapat terjadi apabila keadaan tersebut terjadi :
 - Perkaranya dikembalikan oleh hakim ke JPU karena pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena terdakwa tidak ada.
 - PN mengeluarkan penetapan penahanan untuk selanjutnya JPU melakukan penahanan terhadap terdakwa menerbitkan Berita Acara Pelaksanaan Penetahan Hakim (BA-6) sebagai tindak lanjutnya.

Ada beberapa syarat yang bisa dimintakan selain alasan subyektif dan obyektif yang ada pada KUHAP pada PP nomor 27 tahun 1983 dikenal konsinyasi uang jaminan.

- d. tersangka atau terdakwa melarikan diri, dan sudah lewat waktu 3 bulan tidak ditemukan, namun orang yang menjamin belum juga melaksanakan penyetoran uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penangguhan.

2. Kendala Internal

- a. Terkait dengan kondisi fisik misalnya pada saat terdakwa statusnya sebagai tahanan rutan mengalami kematian dan membutuhkan perawatan rumah sakit. Apabila terjadi maka tanggung jawabnya ada pada pihak yang berwenang melakukan penahanan dan perlu dibantarkan.
- b. Perbedaan status penahanan pada tingkat penuntutan dengan tingkat sebelumnya. Kebijakan penahanan di tingkat penuntutan ini merupakan wewenang penuntut umum. Misalnya pada tahap

penyidikan ditahan kota bisa menjadi tahanan rutan. Yang tidak diperbolehkan saat tahap II kebijakan penurunan status penahanan di tingkat penuntutan misal tahanan rutan dalam kurun waktu di tingkat penuntutan selama 20 hari untuk dewasa dan 10 hari untuk anak-anak penuntut umum mengalihkan / menanggihkan jenis penahanan. Harus ijin Jaksa Agung.

- c. Adanya perbedaan pendapat mengenai kasus penahanan antara JPU sebagai jaksa fungsional yang menyidangkan terdakwa dengan pendapat pejabat struktural di atasnya yaitu Kasi Pidum dan Kajari. Untuk menyikapi hal ini maka ada yang disebut Nota Pendapat sebagai dasar dan bukti tertulis bagi JPU yang menangani dalam melaksanakan kebijakan pimpinan..¹⁹

dapat dilihat dalam beberapa contoh kasus yaitu :

- a. Perkara tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa Susanto, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP :

Dalam surat tuntutannya saat itu, jaksa menuntut terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama enam bulan penjara. Selanjutnya selama proses peradilan terdakwa dilakukan penahanan. Baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan.²⁰ Pada berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa, pertimbangan dilakukannya penahanan kepada terdakwa berdasarkan T-7 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tersangka telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 21 Ayat (4) huruf a KUHP.
 2. Adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/ atau mengulangi perbuatannya.
- b. Perkara tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa Ranga Dida Pratama, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP :

¹⁹ Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Malang dengan Bapak Ari Kuswadi, Staff Pidana Umum tanggal 18 November 2013.

²⁰ Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Malang dengan Bapak Ari Kuswadi, Staff Pidana Umum tanggal 18 November 2013.

Dalam suratuntutannya saat itu, jaksa menuntut terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama tiga bulan penjara. Namun selama proses peradilan terdakwa tidak dilakukan penahanan. Baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan. Dalam proses penyidikan tidak dilakukannya penahanan diketahui dari riwayat perkara yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Malang dari Polres Kota Malang. Selanjutnya dalam berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa, pertimbangan tidak dilakukannya penahanan kepada terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa bekerja di Suzuki Finance sebagai tenaga kontrak sehingga penahanan akan berakibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
 2. Bahwa terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya.
 3. Bahwa terdakwa tidak akan mempersulit proses peradilan serta bersedia hadir apabila diperlukan untuk proses pengadilan.
 4. Bahwa terdakwa bersedia wajib lapor setiap Selasa dan Kamis selama proses di Kejaksaan Negeri Malang. Jadi, dalam kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa terpidana sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Mulai dari proses penyidikan hingga dijatuhkannya putusan pengadilan.
- c. Perkara tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa Sulistyowati, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP :

Dalam suratuntutannya, Jaksa menuntut terdakwa Sulisytowati dengan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dan menuntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Namun selama proses peradilan terdakwa tidak dilakukan penahanan. Baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan. Dalam proses penyidikan tidak dilakukannya penahanan diketahui dari riwayat perkara yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Malang dari Polres Kota Malang. Selanjutnya dalam berita acara pendapat yang dibuat oleh

Jaksa, pertimbangan tidak dilakukannya penahanan kepada terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tersangka sanggup untuk tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa tersangka sanggup bertanggung jawab atas kehadirannya jika diperlukan pihak Kejaksaan Negeri Malang.
3. Tersangka memiliki tanggungan anak.
4. Tersangka telah melakukan perdamaian.

C. Upaya Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menetapkan Kriteria Penerapan Alasan Subyektif Dalam Melakukan Penahanan Di Tahap Penuntutan

Upaya yang dilakukan dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan yaitu dengan cara koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti penyidik dan hakim dengan cara :

- a. Untuk dilakukan upaya penahanan rumah tahanan terhadap tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum melakukan kriteria penerapan :

- 1) sudah terpenuhi semua syarat obyektif dan syarat subyektif untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana.
- 2) Tingkat hunian Rumah Tahanan yang ada di Lembaga Perasyarakatan Klas I Malang.
- 3) Tidak adanya jaminan untuk tidak dilakukan penahanan rumah tahanan terhadap tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana.

- b. Untuk Penahanan Rumah

Untuk dilakukan upaya penahanan rumah terhadap tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum melakukan kriteria penerapan:

- 1) sudah terpenuhi semua syarat obyektif dan syarat subyektif untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka / terdakwa tindak pidana.
- 2) Adanya jaminan terhadap pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana dan melarikan diri.

- 3) Kondisi fisik tersangka / terdakwa tindak pidana umum tidak memungkinkan untuk dilakukan penahanan.
- c. Untuk dilakukan upaya penahanan kota
- 1) Kriteria penerapan oleh JPU bahwa sudah terpenuhi semua syarat obyektif dan syarat subyektif untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka / terdakwa tindak pidana. Adanya jaminan terhadap pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana dan melarikan diri
 - 2) Jaksa Penuntut Umum menganggap tersangka / terdakwa tindak pidana cukup kooperatif dalam rangka mendukung kelancaran penyidikan.
 - 3) Tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana sangat dibutuhkan keluarga tersangka / terdakwa untuk memenuhi bekerja guna kebutuhan ekonomi keluarga tersangka / terdakwa.²¹
- d. Apabila terdakwa sakit dilakukan pembantaran.
- e. Untuk dilakukan Penangguhan Penahanan, jika tersangka atau terdakwa melarikan diri, dan sudah lewat waktu 3 bulan tidak ditemukan diperlukan penetapan Pengadilan Negeri yaitu penetapan itu berisi perintah kepada juru sita pengadilan untuk melakukan “sita eksekusi” terhadap barang milik orang yang menjamin.

E. Penutup

a) Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab hasil pembahsaan dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Secara garis besar kriteria jaksa dalam melaksanakan penahanan dibagi menjadi tiga yaitu:
 - a. Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.
 - b. Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti

²¹ Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Malang dengan Ibu Trisnaulan bagian Seksi Intelijen, 21 Desember 2013.

- c. Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana.
- 2. kendala. Secara garis besar kendala Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan Pengadilan Negeri Malang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diserahkan ke Kejaksaan Negeri Malang.
 - a. Setelah dilakukan pemanggilan, ternyata terdakwa sulit diketahui.
 - b. kondisi rumah tahanan yang kapasitasnya pada status overcapacity.
 - c. Sering terlambat turunnya surat perpanjangan penahanan.
 - d. Pada umumnya pengetahuan tersangka atau terdakwa terhadap hukum acara pidana yang ada sangatlah minim.

b) Saran

- 1. Melakukan koordinasi secara proaktif baik dengan aparat penegak hukum seperti penyidik dan hakim untuk bisa menangani penahanan terdakwa.
- 2. Belum adanya Juknis / Juklak yang mengatur tentang pelaksanaan wajib lapor apabila terdakwa tidak ditahan. Hal ini sangat diperlukanantisipasi oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapi kemungkinan yang bisa menghambat proses tahap II Penuntutan.